



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-11743 /PB.1/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern  
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Periode Triwulan III  
Tahun 2017 Terkait Kinerja UKI Tingkat Wilayah (UKI-W)

29 Desember 2017

Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan merupakan bagian dari ruang lingkup unsur tugas kepatuhan internal yang terintegrasi dengan unsur pelaksanaan tugas UKI sesuai dengan KEP-800/PB/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6456/PB.1/2016 Tanggal 21 Juli 2017 hal Penjelasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Pengendalian Intern.
2. Salah satu *output* pelaksanaan pemantauan pengendalian intern lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang menyajikan hasil pelaksanaan pemantauan pengendalian intern terhadap 3 (tiga) kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang ditetapkan.
3. Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja tersebut disampaikan oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan selaku Unit Kepatuhan Internal tingkat eselon I Ditjen Perbendaharaan (UKI-E1).
4. Terhadap penyampaian laporan akhir triwulanan tingkat unit kerja tersebut, dilakukan penilaian secara berkala oleh UKI-E1 sebagai bahan untuk pembinaan dan evaluasi kinerja pelaporan UKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan (UKI-W).
5. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan pemantauan pengendalian intern pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan periode Triwulan III tahun 2017 diperoleh **nilai rata-rata sebesar 100,13** dengan sebaran data sebagai berikut (rincian terlampir):

No.	Rentang Nilai	Jumlah Unit Kerja
1)	$110 \leq x < 120$	-
2)	$100 \leq x < 110$	18
3)	$90 \leq x < 100$	15
4)	$80 \leq x < 90$	-
5)	$x < 80$	-

6. Berdasarkan Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan periode Triwulan III tahun 2017, tidak terdapat informasi terkait adanya temuan yang bersifat segera dan temuan yang berindikasi *fraud* dari hasil pemantauan pengendalian intern oleh UKI-W pada 3 (tiga) kegiatan yang menjadi obyek pemantauan sebagaimana dimaksud di atas.
7. Beberapa temuan sudah menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut, namun rekomendasi dan tindak lanjut beberapa diantaranya masih berupa rekomendasi yang bersifat korektif, dan hanya memberikan himbauan untuk melengkapi atau melaksanakan atribut yang menjadi temuan tersebut, selanjutnya agar rekomendasi tersebut bersifat substantif dalam rangka meminimalisasi penyebab terjadinya temuan.

8. Dalam rangka peningkatan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan pengendalian internal sebagai perwujudan zona integritas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dimohon agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan langkah-langkah antara lain melakukan pembahasan hasil pemantauan pengendalian internal secara periodik setiap akhir triwulanan dengan seluruh Bidang/Bagian yang menjadi obyek pemantauan (dikoordinasikan oleh Bidang SKKI).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP. 196006031985021001

Tembusan :  
Direktur Jenderal Perbendaharaan



**EVALUASI LAPORAN AKHIR TRIWULANAN  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN  
UNIT KERJA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN  
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2017**

No.	Unit Kerja Kanwil	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kanwil DJPBN Provinsi Aceh	96.21	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif - Nama kegiatan dan jumlah pengendalian utama dalam kegiatan pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung dengan mekanisme LS belum sesuai dengan S-4347/PB.1/2017
2	Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara	99.94	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
3	Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat	99.96	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
4	Kanwil DJPBN Provinsi Riau	100.00	- Tidak ada temuan
5	Kanwil DJPBN Provinsi Jambi	100.00	- Tidak ada temuan
6	Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Selatan	100.00	- Tidak ada temuan
7	Kanwil DJPBN Provinsi Lampung	99.97	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
8	Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu	99.99	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
9	Kanwil DJPBN Provinsi Bangka Belitung	99.10	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
10	Kanwil DJPBN Provinsi Banten	100.00	- Tidak ada temuan
11	Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta	100.00	- Tidak ada temuan
12	Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat	99.98	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
13	Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Tengah	99.997	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
14	Kanwil DJPBN Provinsi Yogyakarta	109.94	- Terdapat temuan - Terdapat rekomendasi dan tindak lanjut substantif
15	Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur	100.00	- Tidak ada temuan
16	Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat	99.91	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
17	Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah	100.00	- Tidak ada temuan
18	Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Selatan	100.00	- Tidak ada temuan
19	Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur	100.00	- Tidak ada temuan
20	Kanwil DJPBN Provinsi Bali	99.94	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif

No.	Unit Kerja Kanwil	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
21	Kanwil DJPBN Provinsi NTB	100.00	- Tidak ada temuan
22	Kanwil DJPBN Provinsi NTT	99.67	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
23	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Selatan	99.97	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
24	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah	100.00	- Tidak ada temuan
25	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara	100.00	- Tidak ada temuan
26	Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo	100.00	- Tidak ada temuan
27	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Utara	99.99	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
28	Kanwil DJPBN Provinsi Maluku Utara	99.94	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
29	Kanwil DJPBN Provinsi Maluku	100.00	- Tidak ada temuan
30	Kanwil DJPBN Provinsi Papua	100.00	- Tidak ada temuan
31	Kanwil DJPBN Provinsi Kepulauan Riau	99.85	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
32	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Barat	100.00	- Tidak ada temuan
33	Kanwil DJPBN Provinsi Papua Barat	100.00	- Tidak ada temuan
<b>Rata-Rata</b>		<b>100.13</b>	